

TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK/		PERIODE			STATUS	SUMBER PENGHASILAN	METODE PEMBUKUAN
2025		1	s.d	12	PEMBETULAN	Pekerjaan	Pencatatan
		BULAN MULAI		BULAN AKHIR			

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP

3328104104960003

2. Nama

INTAN NABILA

3. Jenis ID

KTP

4. No. ID

3328104104960003

5. No. Telepon

087848982403

6. Email

intannabila014@gmail.com

7. Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri

(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH/MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)

8. NIK/NPWP Suami/Istri

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1

a

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D)

2

43.341.388

b

1) Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)

2. Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

1

2) Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3. Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3) Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto?

1. Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan (Lanjut ke pertanyaan 1c)

3. Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)

4) Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan?

1. Dagang (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

2. Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3. Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

5) Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

0

c

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

d

Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

2

Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)

43.341.388

3

Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

4

Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

43.341.388

5

Penghasilan tidak kena pajak

TK/0 = 54.000.000

54.000.000

6

Penghasilan kena pajak (4-5)

0

7

PPh terutang

0

8

Apakah terdapat pengurang PPh terutang?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

9

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

0

D. KREDIT PAJAK

10

a

Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

2

0

b

Angsuran PPh Pasal 25

0

c

STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)

0

d

Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

NIK/NPWP3328104104960003TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK2025

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11

a

PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)

0

b

Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

1

0

c

PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)

0

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

Ganti SPT Sebelumnya

12

a

PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

0

b

PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)

0

G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:

Nomor rekening

Nama bank

1. Dikembalikan melalui pemeriksaan.

Nama pemilik rekening

2. Dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan.

H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13

a

Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?

1

0

b

Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?

1

0

c

Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya?

1

I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14

a

Harta pada akhir Tahun Pajak (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

23.000.000

b

Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak?

2

20.000.000

c

Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final?

2

8.251.000

d

Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?

1

0

e

Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?

1

f

Apakah Anda melaporkan biaya *entertainment*, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?

1

g

Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak?

1

h

Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian.

0

(Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)

J. LAMPIRAN TAMBAHAN

15

a

Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit

1

1. Tidak 2. Ya

b

Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan

1

1. Tidak 2. Ya

c

Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri

1

1. Tidak 2. Ya

d

Surat kuasa khusus

1

1. Tidak 2. Ya

e

Dokumen lainnya

1

1. Tidak 2. Ya

K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan

1

1. Wajib Pajak 2. Kuasa


Tanggal

23 Januari 2026

NIK/NPWP

3328104104960003

Tanda Tangan



Nama

INTAN NABILA

Diandatangani secara elektronik



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : INTAN NABILA
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 1018424

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	15.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HIBAH TANPA AKTA		
Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	16.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	46.500.000
III. HUTANG	Rp.	13.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	33.500.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.